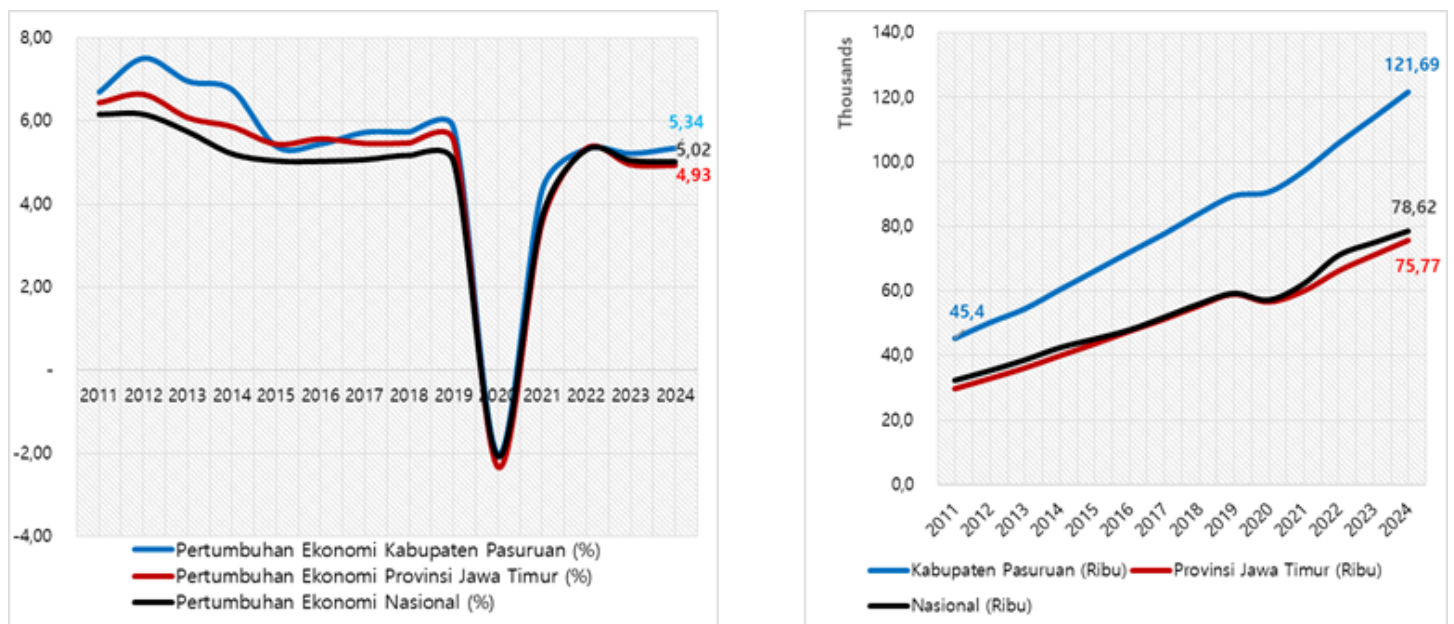




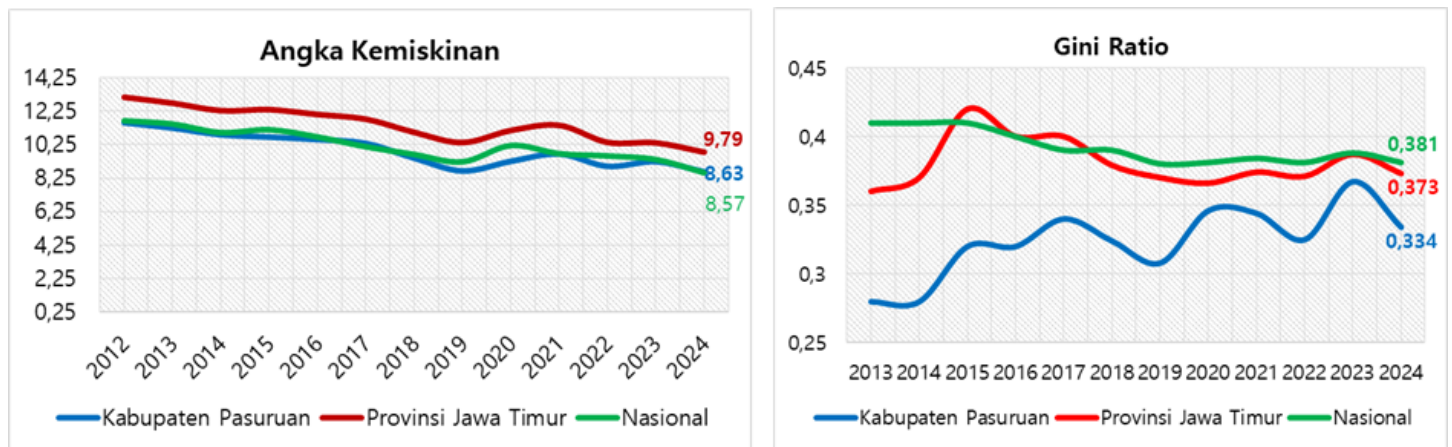
Introduction

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan dari tahun 2011 hingga 2024 cenderung fluktuatif. Akan tetapi, angka laju pertumbuhannya rata-rata selalu berada di atas Nasional maupun Provinsi Jawa Timur (gambar 1). Bahkan jika di tinjau dari PDRB Perkapita, trend dari tahun 2011 hingga 2024 angkanya jauh di atas Nasional maupun Provinsi Jawa Timur (gambar 1).



Gambar 1. Laju Pertumbuhan dan PDRB/Kapita Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Pasuruan Tahun 2011 - 2024

Beberapa indikator makro lainnya yaitu angka kemiskinan dan gini rasio, untuk Kabupaten Pasuruan selalu berada di bawah Nasional maupun Provinsi Jawa Timur (gambar 2).



Gambar 2. Angka Kemiskinan dan Gini Rasio Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Pasuruan Tahun 2011 - 2024

Membaiknya kondisi makro ekonomi di Kabupaten Pasuruan ini tidak lepas dari dorongan beberapa faktor penting diantaranya:

1. Peningkatan konsumsi rumah tangga
2. Peningkatan kinerja dan pendapatan dari industri pengolahan
3. Surplus pada neraca perdagangan terutama dari sektor pertanian
4. Membaiknya pembangunan hingga tingkat desa

Akan tetapi guna menjaga konsistensi pertumbuhan pembangunan secara inklusif, pemerintah Kabupaten Pasuruan tidak boleh terlena dengan adanya pencapaian-pencapaian tersirat dalam indikator makro. Dibutuhkan analisis yang lebih mendalam guna merumuskan kebijakan sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih merata (inklusif). Untuk itu, Kajian Penyusunan Indeks Kesenjangan Wilayah Kabupaten Paruan Tahun 2025 menjadi penting dilakukan.

Kajian memiliki beberapa tujuan utama diantaranya:

1. Untuk mengidentifikasi potensi pembangunan ekonomi di Kabupaten Pasuruan
2. Mengestimasi nilai Indeks Williamsom sebagai indikator kesenjangan pembangunan di masing-masing wilayah Kabupaten Pasuruan pada tahun 2025
3. Mengestimasi nilai Indeks Gini (Gini Ratio) sebagai indikator kesenjangan pendapatan antar penduduk di wilayah Kabupaten Pasuruan pada tahun 2025

Mengestimasi nilai Indeks Gini (Gini Ratio) sebagai indikator kesenjangan pendapatan antar penduduk di wilayah Kabupaten Pasuruan pada tahun 2025

Result

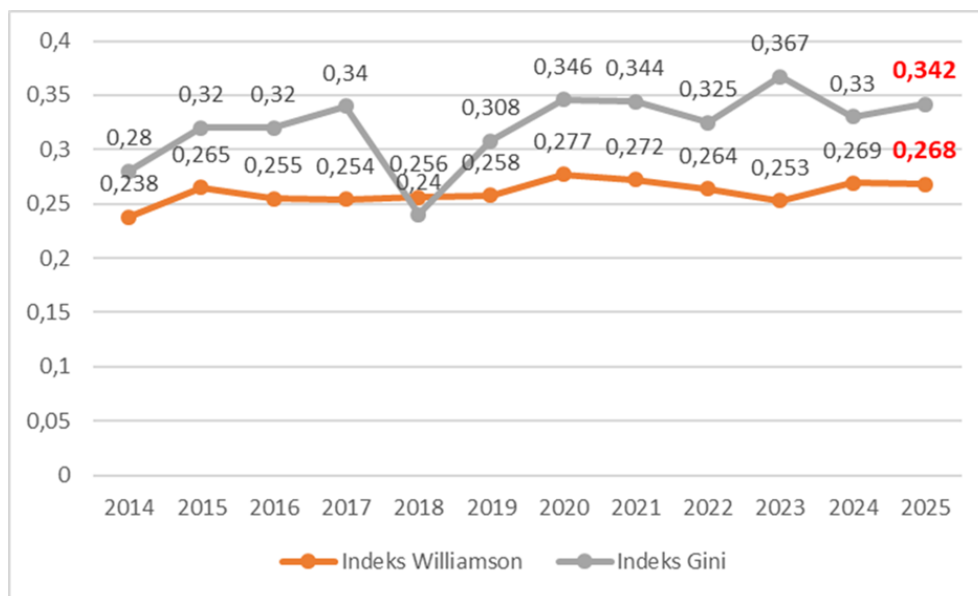
Sektor-sektor penopang pembangunan di Kabupaten Pasuruan berdasar hasil analisis ekonomi regional dapat dilihat pada tabel 1. Dari tabel 1 dapat dipahami bahwa sektor utama penopang pembangunan di Kabupaten Pasuruan tahun 2024 adalah (kuadran I): industri pengolahan dan pengadaan listrik dan gas. Hal ini menjadi bukti bahwa selama ini pembangunan di Kabupaten Pasuruan masih terfokus pada sektor industri lantaran *share* dari sektor tersebut terhadap daerah di bandingkan dengan sektor lain lebih besar.

Yang menjadi permasalahan adalah, tidak semua kecamatan di Kabupaten Pasuruan memiliki kawasan perindustrian. Hal ini berdampak pada terjadinya kutub pembangunan ekonomi. Terlihat dari hasil analisis yang menunjukkan bahwa hanya beberapa kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasuruan seperti: (i) Gempol; dan (ii) Pandaan.

Tabel 1. Analisis Tipologi Klassen (Sektor Penentu Pembangunan Daerah) Kabupaten Pasuruan

Kuadran I Sektor yang maju dan tumbuh pesat (Developed Sector) • Industri Pengolahan. • Pengadaan Listrik dan Gas.	Kuadran II Sektor maju tetapi tertekan (Stagnant Sector) • Konstruksi
Kuadran III Sektor potensial (Developing Sector) • Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. • Pertambangan dan Penggalian. • Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang • Transportasi dan Pergudangan • Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum • Informasi dan Komunikasi • Jasa Keuangan dan Asuransi • Real Estate • Jasa Pendidikan • Jasa Lainnya	Kuadran IV Sektor Relatif tertinggal (Underdeveloped Sector) • Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor • Jasa Perusahaan • Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. • Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

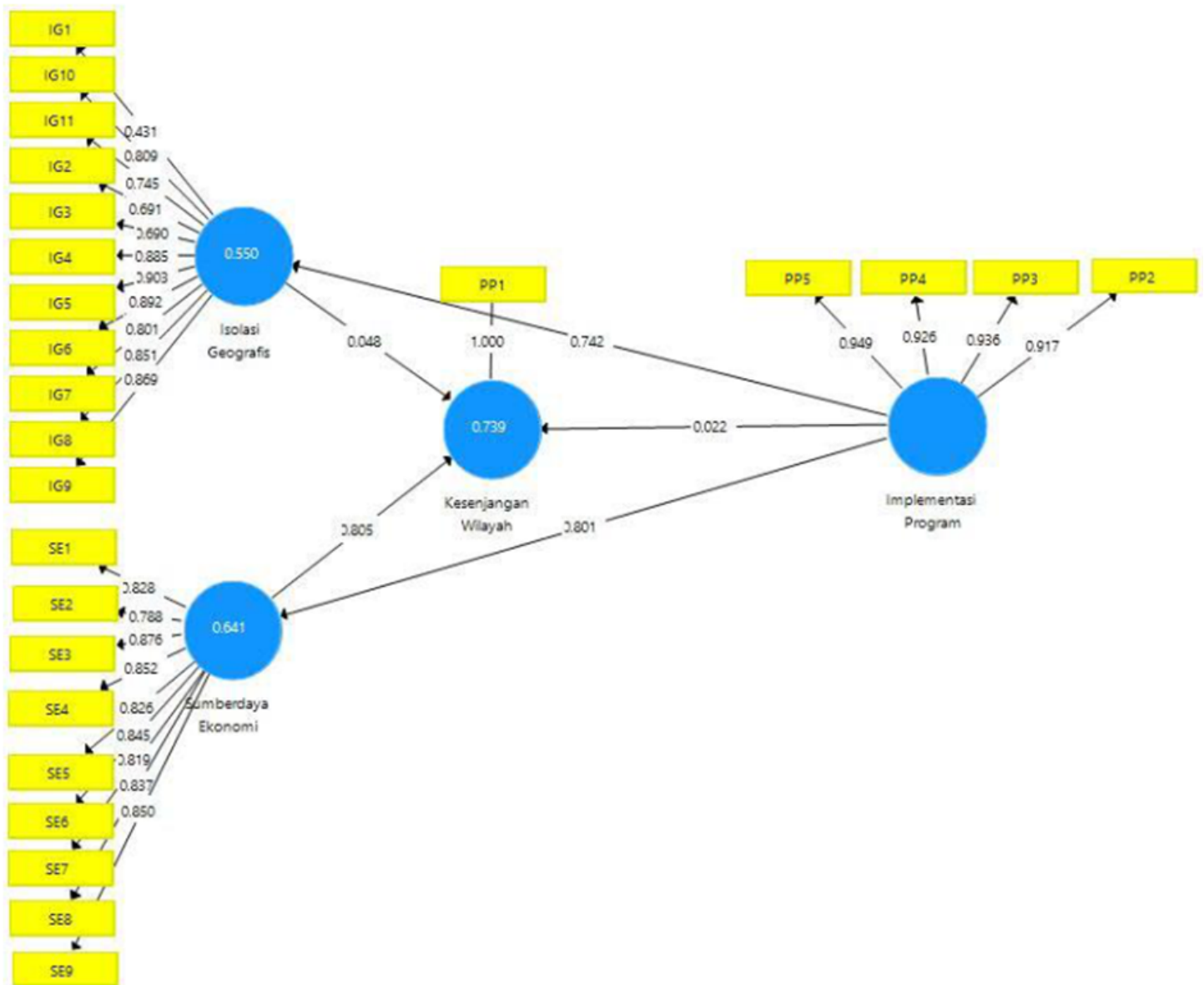
Apakah hasil analisis tersebut sudah cukup mewakili pembangunan wilayah secara keseluruhan? Untuk itu, dalam kajian ini diperlukan beberapa analisis lanjutan sehingga hasil rekomendasi kebijakan lebih implementatif. Analisis berikutnya yaitu melihat dampak kebijakan terhadap kesenjangan wilayah (*Williamson*) dan kesenjangan ekonomi individu masyarakat (indeks gini) (lihat gambar 3).



Gambar 3. Hasil Analisis Williamson dan Indeks Gini Kabupaten Pasuruan Tahun 2025

Hasil analisis indeks Williamson menunjukkan bahwa pada tahun 2025 kesenjangan wilayah di Kabupaten Pasuruan termasuk dalam kategori rendah (0,268). Begitu pula dengan hasil analisis indeks Gini yang menunjukkan angka 0,342 atau masuk kategori sedang.

Analisis berikutnya yaitu melakukan sinkronisasi data skunder dan primer dengan cara memadukan hasil analisis data skunder dan menggali informasi dari masyarakat. Hasil analisis data primer berdasar pengolahan menggunakan Smart-PLS menunjukkan gambar 4.



Gambar 4. Hasil Analisis data Primer Pembangunan Wilayah Kabupaten Pasuruan Menggunakan Smart-PLS

Dari hasil analisis tersebut, terdapat 3 (tiga) faktor yang menentukan ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten Pasuruan berdasar persepsi responden diantaranya: (i) implementasi kebijakan; (ii) pembangunan sumberdaya ekonomi; dan (iii) keterisolasian geografis. Dalam hal implementasi kebijakan, pengaruhnya terhadap ketimpangan wilayah sangatlah kecil hanya 2,2%. Fokus utama dari pemerintah Kabupaten Pasuruan adalah pembangunan sumberdaya ekonomi yang nilainya mencapai 80,1% dan penanggulangan terisolasian geografis yang mencapai 74,2%. Kebijakan ini bukan tanpa alasan, lantaran pemerintah Kabupaten Pasuruan selama ini terfokus pada pembangunan jangka panjang. Dampak dari implementasi kebijakan tersebut terutama dari pembangunan sumberdaya ekonomi berdampak nyata terhadap kesenjangan wilayah sebesar 80,5%. Secara garis besar, indikator makro dalam mengimplementasikan kebijakan harus disinkronisasikan dengan data-data primer dari responden (masyarakat) sehingga dampak kebijakan bisa dirasakan secara menyeluruh (inklusif).

Rekomendasi Kebijakan

Guna menjaga konsistensi pembangunan dan meningkatkannya di beberapa tahun mendatang, setidaknya ada beberapa rekomendasi kebijakan berdasar hasil survey diantaranya:

1. Penguatan pengembangan sarana transportasi, kesehatan dan teknologi di daerah terpencil seperti Kecamatan Puspo, Tosari, Tukur, Pasrepan, dan Lumbang.
2. Penciptaan ekosistem “*knowledge-based economy*” di daerah melalui integrasi lembaga pendidikan, riset, dan bisnis dalam satu klaster ekonomi pengetahuan.
3. Dukungan finansial dan insentif bagi *start-up* atau inovasi karya manusia terdidik.
4. Menjadikan pendidikan sebagai penggerak transformasi ekonomi komunitas melalui *community learning center*